

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Inflasi di Kota Tangerang Selatan pada Triwulan IV Tahun 2025 menunjukkan **eskalasi tekanan inflasi yang cukup jelas namun berada dalam batas yang terkendali**. Kenaikan harga mayoritas disebabkan oleh **komoditas yang tergantung pada musim panen (cabai merah, cabai rawit dan bawang merah) dan komoditas dengan permintaan tinggi (telur ayam ras, daging ayam ras, jeruk dan minyak goreng)**.

Link grafik:

https://drive.google.com/file/d/1MXuBaQeJNsTMiKUTrMNWXzWqxmXHHMTi/view?usp=drive_link

Ketergantungan pada Daerah Sentra akan meningkatkan risiko rantai pasokan, karena gangguan, perubahan harga, masalah kualitas, atau kegagalan dapat secara langsung memicu lonjakan harga, yang pada akhirnya mengancam stabilitas harga bahan pokok penting dan ketahanan pangan di Kota Tangerang Selatan.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Kota Tangerang Selatan bukan daerah produsen pangan utama sehingga **ketergantungan terhadap daerah lain** menyebabkan **harga pangan mudah bergejolak** karena pasokan tidak stabil dan gangguan di daerah pemasok (gagal panen, bencana alam, hambatan distribusi, panen raya) serta gangguan distribusi akan langsung berdampak pada inflasi di Kota Tangerang Selatan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Secara keseluruhan, **kegiatan TPID pada Triwulan IV** didominasi oleh strategi Komunikasi Efektif dan Keterjangkauan Harga. Keterjangkauan Harga yang menjadi fokus utama adalah melalui Operasi Pasar, Penyaluran Minyak, Penyaluran Bantuan Pangan, melakukan pemantauan harga di Pasar Pantau secara rutin serta pendampingan/evaluasi harga pangan di atas HET/HAP. Dalam Ketersediaan Pasokan, TPID berupaya meningkatkan produksi pangan melalui kegiatan Tanam Benih Jagung, Panen Cabai, Pelatihan Hidroponik dan Pemberian Bantuan Alat Pertanian. Sedangkan Kelancaran Distribusi diupayakan pada Penerbitan Pasar Serpong. Komunikasi Efektif dengan kegiatan koordinasi lintas perangkat daerah dan forkopimda.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Kota Tangerang Selatan menghadapi hambatan utama berupa keterbatasan lahan pertanian, sehingga sangat bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah. Hal ini

menyebabkan rentannya ketersediaan pasokan terhadap gangguan distribusi. Selain itu, belum tersedianya data pasokan pangan dan data agen/distributor/pemasok secara real-time menyulitkan pemerintah dalam mengantisipasi lonjakan harga secara dini, dan penilaian kecukupan pasokan untuk Masyarakat serta pengawasan harga guna mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat.

- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 menyebabkan keterbatasan anggaran daerah, sehingga membatasi kapasitas pelaksanaan program pengendalian inflasi secara optimal.
- Meskipun telah dilakukan inisiasi kerja sama dengan beberapa kabupaten/kota penghasil pangan, belum ada tindak lanjut konkret dalam bentuk perjanjian atau mekanisme pemenuhan pasokan. Potensi stabilisasi harga melalui kolaborasi lintas daerah belum dimanfaatkan secara maksimal.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Komitmen dan sinergi dari semua pihak perlu terus diperkuat untuk mengantisipasi potensi gejolak harga di masa mendatang. Langkah konkrit masih perlu terus dilakukan melalui optimalisasi pemantauan harga dan stok pangan, percepatan kerja sama antar daerah dengan mewujudkan perjanjian kerjasama, pembentukan pusat logistik pangan, meningkatkan intensitas operasi pasar dan gerakan pangan murah, optimalisasi gerakan menanam dan kios pangan, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya diversifikasi konsumsi pangan, mempercepat realisasi belanja daerah, menjaga keamanan daerah, menjamin kelancaran lalu lintas, melibatkan media serta platform digital dalam penyampaian informasi terkait tren harga dan upaya pengendalian inflasi.